

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sektor pendapatan negara yang penting di Indonesia adalah pariwisata. Pariwisata mampu memberikan dampak terhadap peningkatan devisa negara, peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan (Kusuma, 2024). Pariwisata di Indonesia menduduki peringkat ketiga terbesar dalam menyumbang devisa negara, selain penyumbang devisa negara, pariwisata juga bisa menjadi penopang roda perekonomian negara karena sifat pariwisata adalah *quick yielding* yang artinya adalah pariwisata mampu memberikan produk secara cepat sehingga pemasukan devisa pun menjadi lebih cepat (Hasibuan, 2023).

Berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata mencapai US\$854,80 miliar pada tahun 2023 dengan persentase pertumbuhan pendapatan secara tahunan (2023-2027) diperkirakan sebesar 4,41% (BPS, 2023). Pariwisata juga memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan lapangan kerja baru. Mengacu pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja pariwisata dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,07 persen per tahun, tercatat pada tahun 2018 sebanyak 19,46 juta tenaga kerja pariwisata mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 21,26 juta tenaga kerja pariwisata (Insnawati, 2023). Data tersebut menunjukkan bagaimana sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara serta kesejahteraan dari masyarakatnya sehingga keberadaan pariwisata ini menjadi aspek penting bagi Indonesia.

Pariwisata memainkan peran yang penting dalam memajukan kehidupan masyarakat, dengan peran tersebut maka sangat penting untuk membangun pariwisata Indonesia dengan mengikuti perkembangan pariwisata global. Saat ini sedang terjadi perkembangan pariwisata secara global, banyak konsep pariwisata yang ikut berkembang pula seperti pembangunan pariwisata berkelanjutan, pariwisata pedesaan, pariwisata hijau, ekowisata, dan geowisata yang juga

menyebabkan pergeseran peminatan wisatawan terhadap produk wisata (Putu & Prasiasa, 2023). Perkembangan tersebut menghasilkan salah satu jenis pariwisata di Indonesia yaitu pariwisata berbasis masyarakat atau biasa disebut dengan *Community Based Tourism (CBT)*.

Munculnya konsep pariwisata yang baru memberikan pilihan yang lebih variatif untuk para wisatawan dan menawarkan pengalaman-pengalaman baru yang mampu menarik perhatian para wisatawan. Perkembangan pariwisata di Indonesia mulai mengarah kepada pariwisata alternatif (*alternative tourism*) yang berfokus pada wisata alam, budaya, dan masyarakat lokal menuju pariwisata massal (*mass tourism*) yang berorientasi dalam kegiatan bersama dimana para wisatawan melakukan kegiatan tersebut dalam satu waktu (Herdiana, 2019). Pariwisata alternatif mampu memberikan dampak lingkungan yang minim dan dampak ekonomi yang diberikan bisa langsung didapatkan oleh para masyarakat lokal karena kegiatan pariwisata tersebut dilakukan disekitar pemukiman masyarakat (Made Darsana, 2022). Perkembangan pariwisata alternatif ini menjadi peluang bagi masyarakat lokal untuk memajukan potensi wisata daerah mereka dan mengelola secara langsung wisata tersebut agar pendapatan untuk masyarakat lokal makin meningkat, perkembangan ini menjadi penggerak bagi sektor pariwisata berbasis komunitas atau masyarakat yang biasa disebut dengan istilah *Community Based Tourism (CBT)*.

Community Based Tourism adalah konsep pariwisata yang menjadi bentuk penerapan pembangunan berkelanjutan untuk para masyarakat setempat yang tinggal di lokasi dengan potensi wisata yang baik (Hadi Bangun & Adiarto, 2024). Pariwisata berbasis komunitas/masyarakat adalah salah satu bentuk pembangunan pariwisata partisipatif yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah mereka. Pariwisata di Indonesia sejatinya adalah pariwisata yang berlandaskan asas kemasyarakatan (Prasta, 2021), maka dari itu, pariwisata berbasis masyarakat ini menjadi konsep pariwisata yang memiliki tujuan memajukan masyarakat melalui kontribusi masyarakat itu sendiri dalam mengelola pariwisata tersebut.

Konsep *CBT* bertujuan untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat lokal kepada turis untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat (Hadi Bangun & Adianto, 2024). *CBT* mengutamakan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki tanpa campur tangan dari pihak luar untuk menjaga orisinalitas dari daya tarik wisatanya. Konsep pariwisata berbasis masyarakat ini melibatkan masyarakat langsung dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisatanya dan memiliki kesempatan dalam mendapatkan keuntungan secara merata (Prasta, 2021).

Model *Community Based Tourism (CBT)* ini banyak digunakan di Indonesia khususnya di level desa yang memiliki potensi wisata atau biasa disebut dengan desa wisata. Desa wisata adalah komunitas penduduk di suatu wilayah yang saling berinteraksi dalam mengembangkan potensi pariwisata di daerah mereka dengan didasari rasa peduli dan kesadaran untuk memajukan pariwisata mereka (Yustiana, 2023). Secara singkat, desa wisata merupakan kelompok masyarakat yang merupakan penduduk daerah tersebut dan memiliki rasa peduli serta kesadaran untuk memberdayakan potensi pariwisata di desa mereka. Desa wisata merupakan daerah pedesaan yang memberikan kesan originalitas di segi sosial budaya, arsitektur adat – istiadat, keseharian, serta struktur tata ruang desa yang terintegrasi pariwisata meliputi atraksi, akomodasi, serta sarana pendukung lainnya (Rini, 2022). Desa wisata memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh objek wisata lainnya yaitu orisinalitas unsur-unsur wisata tersebut.

Pengembangan desa wisata yang didasari kearifan lokal dapat melahirkan produk wisata yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan, serta menumbuhkan rasa bangga masyarakat desa terhadap kepemilikan identitas budaya (Putu & Prasiasa, 2023). Desa wisata menjadi objek wisata yang bisa memajukan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memberikan lapangan kerja dan meningkatkan standar kehidupan mereka. Masyarakat berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena dampak positif yang diberikan oleh desa wisata yang dikembangkan akan langsung mereka terima secara langsung, dengan pengembangan tersebut diharapkan akan meningkatkan pembangunan daerah setempat dan mensejahterakan masyarakat sekitarnya (Yustiana, 2023). Melalui pembangunan desa wisata mampu meningkatkan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pembangunan tersebut membuka banyak lapangan kerja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mendapatkan sumber pendapatan lain (Oktadiani, 2022).

Pembangunan desa wisata tidak lepas dari permasalahan yang timbul dalam proses perkembangannya, permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan desa wisata adalah kurangnya keterlibatan masyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu, partisipasi masyarakat dalam mengelola desa wisata masih kurang. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pengembangan desa wisata sehingga kesadaran mereka tentang potensi wisata sangat kurang bahkan, sebagian dari mereka tidak mengetahui kegiatan desa wisata dan pemahaman tentang pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan lagi (Azizah, 2023; Karnayanti, 2019; Sari, 2021) .

Salah satu desa wisata yang menarik di Indonesia adalah Desa Wisata Bontang Kuala di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Desa wisata ini memiliki ciri khas permukiman nelayan di atas laut dengan berbagai daya tarik wisata yang variatif dan keunggulan sumber daya alam seperti pantai, pulau, hutan bakau, dan terumbu karang menjadi keunikan yang dimiliki oleh Desa Wisata Bontang Kuala (Kemenparekraf, 2021). Desa Wisata Bontang Kuala dinobatkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pelopor desa wisata di Kalimantan Timur karena selain mengembangkan potensi wisatanya, Desa Wisata Bontang Kuala juga memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitarnya dengan adanya upaya konservasi alam seperti hutan *mangrove*.

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui ajang penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) terdapat empat klasifikasi desa wisata. Kategori desa wisata yang pertama adalah Desa Wisata Rintisan yang artinya desa wisata tersebut baru memulai beroperasi dan masih dalam lingkup yang terbatas. Kategori kedua adalah Desa Wisata Berkembang yang artinya desa wisata tersebut sudah stabil dan memiliki kepengurusan yang jelas. Kategori ketiga adalah Desa Wisata Maju yaitu untuk desa wisata yang berperan aktif dalam perkembangan ekonomi warga desa dan sekitarnya, dan kategori yang terakhir adalah Desa Wisata Mandiri yaitu desa wisata yang sudah memiliki pengunjung dari lingkup yang lebih luas. Desa Wisata Bontang Kuala termasuk dalam

klasifikasi Desa Wisata Maju karena sudah mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian warga desa Bontang Kuala (Kemendparekraf, 2021).

Di daerah Kota Bontang, Kalimantan Timur terdapat 5 desa wisata termasuk Desa Wisata Bontang Kuala. Desa wisata maju terdiri dari 2 yaitu Desa Wisata Bontang Kuala dan Desa Wisata Malahing, desa wisata dengan kategori berkembang hanya ada satu yaitu Desa Wisata Guntung dan desa wisata dengan kategori rintisan terdiri dari dua yaitu Desa Wisata Tanjung Laut Indah dan Desa Wisata Kelurahan Belimbing (Jadesta, 2021). Desa Wisata Malahing merupakan desa wisata yang berfokus pada aktivitas ekowisata seperti budidaya rumput laut, observasi satwa, dan kerajinan lokal, perbedaan antara kedua desa wisata maju ini adalah objek pariwisata dari masing-masing desa wisata. Desa Wisata Bontang Kuala yang merupakan desa wisata dengan keragaman pariwisata laut sedangkan Desa Wisata Malahing yang memiliki keragaman ekowisata.

Masyarakat Desa Wisata Bontang Kuala yang mayoritas adalah masyarakat nelayan bekerja sama dengan pemerintah setempat dan pengelola dalam mengembangkan program wisata laut mereka sedangkan Desa Wisata Malahing yang sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat, pengelola, dan terdapat perusahaan swasta yang ikut berkontribusi dalam membangun pariwisata di Desa Wisata Malahing, hal tersebut menjadi perbedaan yang signifikan dalam proses pengembangan program wisata dari masing-masing desa wisata (Jadesta, 2021).

Pengelola Desa Wisata Bontang Kuala adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kuala Abadi, mereka berperan dalam pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Bontang Kuala. Pokdarwis ini pernah menjadi perwakilan Kalimantan Timur dalam ajang Pokdarwis Tingkat nasional pada tahun 2019. Prestasi tersebut menunjukkan kapabilitas mereka dalam mengelola dan mengembangkan Desa Wisata Bontang Kuala. Bersama pemerintah setempat mereka merancang sebuah program wisata yang nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat agar program mampu terlaksana dengan baik. Perkembangan Desa Wisata Bontang Kuala tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan oleh pihak pengelola dan pemerintah setempat, untuk melihat

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa wisata ini, peneliti menggunakan teori komunikasi partisipatif untuk menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Bontang Kuala.

Dari wawancara pra-penelitian yang dilakukan dengan ketua pokdarwis Desa Wisata Bontang Kuala yaitu Ibu Halimah, ditemukan bahwa dalam upaya sosialisasi program wisata laut kepada masyarakat nelayan, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan program wisata laut tersebut. Desa Wisata Bontang Kuala merupakan pelopor desa wisata yang ada di Kalimantan Timur, namun partisipasi masyarakat dalam mengembangkan program wisata yang ada disana masih kurang. Sosialisasi program wisata laut yang dilakukan oleh pihak pengelola dan pemerintah mengalami kendala sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat yang berkurang terutama masyarakat nelayan dalam mengembangkan program wisata laut tersebut.

Pembangunan desa wisata membutuhkan partisipasi dari masyarakatnya dalam mengembangkan pariwisata di desa mereka, untuk itu, teori komunikasi partisipatif mampu melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola desa wisata lewat perspektif komunikasi. Komunikasi partisipatif adalah sebuah proses komunikasi dialogis atau dua arah yang mampu menimbulkan persamaan makna pada pesan yang sedang diutarakan. Penerapan komunikasi partisipatif dalam pembangunan desa wisata menempatkan masyarakat dan penentu kebijakan dalam posisi sejajar untuk mengambil sebuah keputusan terkait arah pembangunan (Joharsoyo, 2023). Sebelum terjadi perkembangan komunikasi, para ahli menggunakan teori partisipatif dalam pendekatan penyelesaian suatu masalah sosial (Turmudi, 2019). Ciri khas dari teori komunikasi partisipatif adalah posisi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat mampu terlibat secara langsung dan memiliki peran dalam menentukan arah keputusan yang akan diambil. Model komunikasi partisipatif ini sangat menunjukkan kerjasama dari berbagai tingkat (Pitasari, 2019), kerjasama ini menunjukkan bagaimana pihak-pihak yang terlibat berada di level yang setara dan saling bahu-membahu untuk membangun dan mengembangkan pariwisata di desa tersebut.

Fenomena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan program wisata mampu dikaji menggunakan teori *CBT* dan teori komunikasi partisipatif karena teori ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam sebuah kegiatan atau program karena masyarakat termasuk dalam pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program tersebut. Komunikasi partisipatif merupakan sebuah kegiatan terencana sebagai strategi dan pendekatan komunikasi dalam proses pembangunan serta solusi dalam memfasilitasi proses partisipatif masyarakat apabila sesuai dengan permasalahan pembangunan di tingkat lokal (Sofia, 2021). Dengan teori komunikasi partisipatif, poin penting adalah mencari tahu bagaimana upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk memberikan pengetahuan asli terkait proses pembangunan yang terjadi (Fadipe & Molale, 2024). Partisipasi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan program atau kebijakan yang ada mampu memicu rasa kepemilikan dan komitmen terhadap keberhasilan sehingga mampu mengurangi resiko kegagalan dalam pelaksanaan program tersebut (Muhoro Maina, 2020).

Komunikasi partisipatif sangat melekat dengan model komunikasi yang terdiri dari lima prinsip utama yaitu dialog, penyadaran, *praxis*, perubahan, dan kesadaran kritis (Sutowo, 2020). Komunikasi partisipatif juga memiliki prinsip yang masing-masing prinsip tersebut harus saling mendukung dan melengkapi dalam pelaksanaannya agar berjalan dengan efektif, prinsip tersebut adalah dialog yang artinya kebebasan dan keterbukaan dalam proses pertukaran pesan yang membutuhkan perhatian penuh. Selanjutnya adalah suara yang berarti pusat atau inti dari sebuah dialog yang menunjukkan adanya ruang dan waktu bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka. Kemudian *liberating pedagogy* yang memiliki makna bagaimana cara seseorang dalam berkomunikasi dalam proses dialogis untuk membantu menyalurkan pesan dan terakhir adalah *action-reflection-action* dimana prinsip ini adalah sebuah kegiatan merefleksikan masalah dan melakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut (Sutowo, 2020). Sifat komunikasi partisipatif adalah memusat dan alur pertukaran informasi yang melingkar sehingga penyamaan makna pesan bisa berlangsung dengan baik. Dalam proses komunikasi yang memusat, setiap pelaku komunikasi berusaha untuk menafsirkan dan memahami informasi yang diterima sebaik mungkin (Febrianti & Andalas, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas fenomena pembangunan desa wisata menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif. Penelitian yang meneliti tentang bagaimana penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa wisata di Desa Durian Demang menemukan bahwa strategi komunikasi partisipatori dalam mengembangkan desa wisata merupakan strategi yang efektif namun pembentukan dan pembangunan desa wisata tetap menjadi sebuah tantangan tanpa partisipasi dari masyarakatnya (Nurina Pitasari, 2019). Temuan dari penelitian lain yang menjelaskan teori komunikasi partisipatif dalam upaya konservasi burung di Desa Jatimulyo Kabupaten Kulonprogo adalah pihak pemangku kepentingan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kesan kelompok yang eksklusif serta tidak adanya ruang dialog yang inklusif sehingga partisipasi masyarakat sangat minim akibat tidak adanya rasa memiliki terhadap program konservasi burung disana (Joharsoyo, 2023).

Penelitian lain yang menganalisis tentang pentingnya komunikasi partisipatif sebagai strategi kritis dalam pembangunan kewarganegaraan menemukan bahwa kontribusi komunikasi partisipatif sebagai strategi penting konstruksi kewarganegaraan bergantung pada kedinamisan masyarakatnya dimana pendekatan komunikasi partisipatif memungkinkan terjadinya dinamisasi perilaku sosial sesuai dengan pemberdayaan sosial (Rios, 2021). Temuan penelitian ini adalah menemukan bahwa penerapan komunikasi partisipatif sangat bergantung pada bagaimana masyarakat karena pemberdayaan masyarakat mampu memicu perubahan sifat sosial suatu masyarakat. Penelitian lain yang mengeksplor bagaimana penggunaan komunikasi partisipatif sebagai instrumen dalam meningkatkan produksi pertanian untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat pedesaan menemukan bahwa penerapan komunikasi partisipatif tidak dijalankan dengan baik, hal tersebut didasari oleh fakta bahwa pendekatan *top-down* masih digunakan dalam praktik pertanian dan interaksi antara petani dan pembuat kebijakan sangat kurang serta tidak berlangsung secara berkelanjutan (Gebeyehu & Jira, 2023).

Desa Wisata Bontang Kuala merupakan desa wisata yang termasuk dalam kategori desa wisata maju berdasarkan penilaian dari Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI), namun, masih ditemukan adanya permasalahan dalam hal partisipasi masyarakat dalam mengembangkan program wisata laut. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apa yang menjadi permasalahan komunikasi partisipatif masyarakat Desa Wisata Bontang Kuala dalam mengembangkan program wisata laut (Jadesta, 2021).

Komunikasi partisipatif merupakan teori komunikasi yang mengutamakan partisipasi para pelaku komunikasi dalam sebuah ruang dialog, teori ini relevan dalam upaya pembangunan desa wisata karena teori ini mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengembangan program wisata seperti dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan mengelola desa wisata. Dengan begitu, komunikasi partisipatif memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembangunan desa wisata. Masalah yang ditemukan di Desa Wisata Bontang Kuala adalah pihak pengelola dan pemerintah mengalami kendala dalam sosialisasi program wisata laut sehingga partisipasi masyarakat setempat terutama masyarakat nelayan menjadi berkurang. Penelitian terdahulu membahas tentang partisipasi masyarakat secara praktis dan umum namun belum memperhatikan partisipasi masyarakat dalam proses komunikasinya, maka dari itu terdapat celah penelitian yaitu penelitian mengenai komunikasi partisipatif masyarakat dalam proses komunikasi pada pengembangan pariwisata. Hal ini menjadi sebuah kebaruan dari penelitian yang menganalisis komunikasi partisipatif masyarakat desa wisata dalam mengembangkan program wisata laut di Desa Wisata Bontang Kuala dan berfokus pada partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi yang terjadi pada pengembangan program wisata laut.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis komunikasi partisipatif masyarakat dalam mengembangkan program wisata laut di desa wisata Bontang Kuala.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana komunikasi partisipatif masyarakat dalam mengembangkan program wisata laut di desa wisata Bontang Kuala?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dalam kajian komunikasi pembangunan partisipatif dalam konteks komunikasi pembangunan desa wisata.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi pengelola desa wisata dalam mengembangkan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat pedesaan khususnya dalam program pariwisata daerah pesisir.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada 31 Desember 2024 s/d 4 Januari 2025 di Desa Wisata Bontang Kuala yang berlokasi di Jl. Piere Tendean RT 11 No. 07 Batu Sahasa 4 Bontang Kuala, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Perencanaan waktu penelitian dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1 1 Tabel Perencanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan							
		9	10	11	12	1	2	3	4
1	Penelitian Pendahuluan								
2	Seminar Judul								
3	Penyusunan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Pengumpulan Data								
6	Pengolahan dan Analisis Data								
7	Ujian Skripsi								